

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Objek Penelitian	10
4. Data Penelitian atau Bahan Hukum	11
5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum	11
6. Analisis atau Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	15
B. Pertimbangan Hakim	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2. Dasar Pertimbangan Hakim	26
C. Putusan Pengadilan	29

1. Arti Putusan Pengadilan	29
2. Asas Putusan	30
3. Formulasi Putusan.....	37
4. Mencari dan Menemukan Hukum.....	38
5. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan	39
6. Putusan Ditinjau dari Berbagai Segi	40

BAB III PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan	42
B. Teori Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	48
C. Putusan Pengadilan dan KTUN	52
1. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	52
2. Keputusan TUN sebagai Objek Sengketa	56
3. Kewenangan dan Keabsahan Keputusan TUN	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	70
1. Kasus Posisi dalam Putusan No : 06/G/2013/PTUN-YK	70
a. Identitas Para Pihak	70
b. Putusan	71
2. Kasus Posisi dalam Putusan No : 10/G/2010/PTUN-YK	71
a. Identitas Para Pihak	71
b. Putusan	72
B. Pembahasan	74
1. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat Menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan AAUPB	76
a. SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta No: Kw.12.1/2/KP.07.5/1724/2010	77
b. Keputusan Menteri Kehutanan S.02/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, perihal Ralat SK. Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/Rhs/2012 dan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah	

Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013	81
2. Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan PTUN Yogyakarta perkara nomor :10/G/2010/PTUN-YK dalam perkara mutasi guru dengan perkara No:06/G/2013 perkara ralat SK Menteri Kehutanan	86
a. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Nomor : 10/G/2010/PTUN-YK	86
b. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-YK	99
3. Perbedaan Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor:10/G/2010/PTUN-YK dalam Perkara Mutasi Guru Dengan Perkara No:06/G/2013 Perkara Ralat SK Menteri Kehutanan	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP